

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JTP Eselon 2) Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JTP Eselon 2) sudah dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif. Hal ini tidak terlepas dari adanya akses, partisipasi dan kontrol yang baik dalam pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JTP Eselon 2) Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut :

6.1.1 Akses

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengumuman lowongan Jabatan Tinggi Pratama (JTP Eselon 2) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 secara terbuka dan kompetitif. Pengumuman tersedia di website BKPSDMD Manggarai Barat, surat edaran ke OPD terkait, dan papan pengumuman di Kantor BKPSDMD. Informasi yang disampaikan mencakup nama jabatan, persyaratan administrasi, kualifikasi pendidikan, standar kompetensi, persyaratan integritas, batas waktu lamaran, tahapan seleksi, kontak Sekretariat Panitia Seleksi, dan prosedur pengisian JTP.

6.1.2 Partisipasi

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa partisipasi ASN perempuan dalam seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JTP Eselon 2) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 sangat rendah, dengan hanya satu perempuan dari 21 peserta. Ketimpangan gender ini disebabkan oleh kurangnya rekomendasi dari Pejabat Yang Berwenang (Pyb) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tidak adanya undangan resmi dari Panitia Seleksi (Pansel), serta persyaratan kualifikasi dan pengalaman yang ketat yang banyak ASN perempuan belum memenuhinya. Meskipun demikian, proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai ketentuan Pasal 120 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019. Seleksi administrasi, seleksi kompetensi, penelusuran rekam jejak, dan wawancara akhir merupakan salah satu tahapan seleksi, serta tes kesehatan dan kejiwaan, memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi semua persyaratan yang terpilih. Meskipun ada ketimpangan gender, proses seleksi yang komprehensif dan transparan ini diharapkan menghasilkan pejabat yang mampu berkontribusi maksimal dalam pemerintahan daerah Manggarai Barat.

6.1.3 Kontrol

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kontrol dalam pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JTP Eselon 2) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 melibatkan penetapan dan pengangkatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). PPK membentuk panitia seleksi dari

pejabat terkait dan pakar, sesuai dengan Pasal 114 ayat 5 Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017. Panitia seleksi ini bertanggung jawab untuk memilih tiga calon yang paling memenuhi syarat, yang kemudian disampaikan kepada PPK, yaitu Bupati Manggarai Barat. Proses seleksi harus memperhatikan rekomendasi KASN dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri serta Menteri PANRB untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Semua tahapan ini dilaksanakan dengan mematuhi sejumlah ketentuan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 untuk menjamin pejabat terpilih memiliki keterampilan dan akhlak mulia sesuai dengan tuntutan organisasi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran yaitu :

- 1) Kedepannya untuk meningkatkan partisipasi ASN perempuan dalam seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JTP Eselon 2), disarankan agar pengumuman lowongan dilengkapi dengan inisiatif proaktif seperti sosialisasi khusus dan pemberian dukungan tambahan kepada calon perempuan, serta memastikan bahwa undangan resmi juga dikirim langsung kepada kandidat perempuan potensial.
- 2) Kedepannya untuk meningkatkan partisipasi ASN perempuan dalam seleksi JTP Eselon 2 di Kabupaten Manggarai Barat, disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari Pejabat Yang Berwenang (Pyb) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terhadap kandidat perempuan, serta memastikan adanya undangan resmi dan sosialisasi

seleksi yang inklusif kepada ASN perempuan potensial.

- 3) Kedepannya untuk memperkuat proses kontrol dalam pengisian JTP Eselon 2 di Kabupaten Manggarai Barat, disarankan untuk meningkatkan transparansi dan inklusivitas dengan memperluas keterlibatan pakar dan akademisi yang lebih beragam dalam panitia seleksi. Ini dapat membantu memastikan bahwa perspektif yang luas dan komprehensif diperhatikan dalam penilaian terhadap calon, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses seleksi yang dilaksanakan.